

13

LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau *PEER REVIEW*

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : **PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Jumlah Penulis : 2 Orang

Nama-nama Penulis : 1.Sahuri Lasmadi 2. Elly Sudarti

Status Penulis : Penulis ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama jurnal : REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum
- b. Nomor ISSN : ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
- c. Vol., No., Bulan, Tahun : Volume 5 Nomor 2, April 2021, Halaman 199-218
- d. Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
- e. DOI Artikel (jika ada) : DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>
- f. Alamat Web Jurnal : <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/issue/view/264>
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/4144>
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/4144/1753>
- g. Terindeks di : Sinta 2 <https://sinta.ristekbrin.go.id/>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **)

(beri tanda $\checkmark$ yang dipilih) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN *Peer Review* :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ***) ☐	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)		2,5		2,5
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)		7,5		7
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)		7,5		7,5
	Total 100%		25		24
	Kontribusi Pengusul Penulis ke 1 60% x Nilai Akhir yang diperoleh = 24 x 0,6 = 14,4				

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

1. Tulisan dalam artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang terbit di Sinta 2 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi. Karena dalam artikel membahas tentang Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Pokok pembahasan difokuskan pada sulitnya proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang yang kemudian digunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan.
2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan Tulisan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum tentang Proses pembuktian dalam Tindak

Pidana Pencucian Uang memiliki perbedaan dari pemeriksaan kasus pidana pada umumnya, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), jadi proses penanggulangannya harus menggunakan upaya yang luar biasa juga (*extraordinary Enforcement*). Salah satu bentuk upaya luar biasa tersebut adalah dalam konteks pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan yang menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian.

3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian sangat memadai karena metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil Pemelitian menunjukkan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana, namun konsep pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 yang diterapkan baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5) tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang PP TPPU, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.
4. Tulisan dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan bahwa alasan diterapkannya pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang karena pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang rumit serta melibatkan pelaku yang memiliki jaringan kejahatan (*crime network*) yang terorganisir sehingga dalam proses pembuktian di pengadilan kadangkala penuntut umum kesulitan dalam membuktikan kasus pencucian uang di pengadilan, ditambah pula semakin mutakhirnya teknologi informasi di bidang keuangan dan perbankan membuat sulit menjerat pelaku tindak pidana ini.
5. Tulisan dalam artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang memiliki reputasi Jurnal Nasional yang terakreditasi dan terindeks di Sinta 2, <https://sinta.ristekbrin.go.id/>, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/issue/view/264>
6. Kesesuaian bidang ilmu: Tulisan dalam artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni terutama pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 4 Juni 2021
REVIEWER : *X/ 2 ***)

Nama: **Prof. Dr. Bahden Johan Nasution, S.H., M.Hum.**
NIP: **195703111989027002**
Jabatan Fungsional: **Guru Besar**
Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**

LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : **PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
Jumlah Penulis : 2 Orang
Nama-nama Penulis : 1.Sahuri Lasmadi 2. Elly Sudarti
Status Penulis : Penulis ke 1
Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama jurnal : REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum
b. Nomor ISSN : ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
c. Vol., No., Bulan, Tahun : Volume 5 Nomor 2, April 2021, Halaman 199-218
d. Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
e. DOI Artikel (jika ada) : DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>
f. Alamat Web Jurnal : <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/issue/view/264>
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/4144>
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/4144/1753>
g. Terindeks di : Sinta 2 <https://sinta.ristekbrin.go.id/>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **)
(beri tanda $\checkmark$ yang dipilih) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN Peer Review :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ***) ☐	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)		2,5		2,5
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)		7,5		7
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)		7,5		7,5
	Total 100%		25		24
	Kontribusi Pengusul Penulis ke 1 $60\% \times \text{Nilai Akhir yang diperoleh} = 24 \times 0,6 = 14,4$				

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

1. Artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang terbit di Sinta 2 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi. Karena dalam artikel membahas tentang Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Pokok pembahasan difokuskan pada sulitnya proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang yang kemudian digunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan.
2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum tentang Proses pembuktian dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang memiliki perbedaan dari pemeriksaan kasus pidana pada umumnya, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), jadi proses penanggulangannya harus menggunakan upaya yang luar biasa juga (*extraordinary Enforcement*). Salah satu bentuk upaya luar biasa tersebut adalah dalam konteks pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan yang menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian.

3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian sangat memadai karena metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil Pememlitian menunjukkan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana, namun konsep pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 yang diterapkan baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5) tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang PP TPPU, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.
4. Dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan bahwa alasan diterapkannya pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang karena pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang rumit serta melibatkan pelaku yang memiliki jaringan kejahatan (*crime network*) yang terorganisir sehingga dalam proses pembuktian di pengadilan kadangkala penuntut umum kesulitan dalam membuktikan kasus pencucian uang di pengadilan, ditambah pula semakin mutakhirnya teknologi informasi di bidang keuangan dan perbankan membuat sulit menjerat pelaku tindak pidana ini.
5. Artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang memiliki reputasi Jurnal Nasional yang terakreditasi dan terindeks di Sinta 2, <https://sinta.ristekbrin.go.id/>, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/issue/view/264>
6. Kesesuaian bidang ilmu: Artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni terutama pembuktian terbalik pada tindak pidan korupsi, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 3 Juni 2021

REVIEWER : 1 / 2 **)



Nama: **Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.**

NIP: **195503231984031001**

Jabatan Fungsional: **Guru Besar**

Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**